BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN
Nomor : 810/3442/BKD/2019

TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 786 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1150/S.SM.01.00/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Persetujuan Revisi Penetapan Formasi CPNS Kabupaten Mandailing Natal, maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan melaksanakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN RINCIAN JUMLAH ALOKASI FORMASI SERTA UNIT KERJA PENEMPATAN (terlampir)

II. KRITERIA PELAMAR

a. **Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
b. **Formasi Khusus** terdiri dari:

Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas berupa tuna daksa (cacat fisik) pada anggota tubuh yang memenuhi ketentuan :

1. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
2. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, menulis / mengetik,menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
3. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan;
4. Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas Tuna Daksa (cacat fisik) pada anggota tubuh.

III. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
11. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar formasi khusus Penyandang Disabilitas berupaTunadaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis / tingkat disabilitasnya sebagaimana format terlampir;
    b. Panitia wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang/melihat calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.
12. Persyaratan lain yang sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelama Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Khusus Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara online ke alamat website Portal SSCN 2019 https://sscasn.bkn.go.id;
2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran secara online dan mencermati setiap keterangan/ instruksi/ pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman –halaman pendaftaran online tersebut;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Khusus Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara online,Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Khusus Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019,wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1(satu) Instansi/ Daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1(satu) jenis formasi (Formasi Umum/ Formasi Khusus);
6. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT(Computer Asissted Test);
7. Semua informasi atau data yang disikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
8. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan e-KTP Pelamar, bukan menghubungike Instansi/ Daerah/ Badan Kepegawaian Negara/ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

9. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
10. Jika anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
11. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, pelamar formasi **disabilitas wajib hadir di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal** untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya setelah selesai melaksanakan pendaftaran online,;

C. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan*, yang meliputi:

1. Swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun;
2. Kartu Tanda Penduduk Asli /Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6;
4. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal di Panyabungan dan ditandatangani di atas meterai 6000 *(format lamaran terlampir)*;
5. Ijazah asli;
6. Transkrip Nilai asli;
7. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi saat kelulusan atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi dan Program studi pelamar yang berasal dari Portal https://banpt.or.id (bagi pelamar yang Ijazah dan Transkrip nilai belum mencantumkan status terakreditasinya)
8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (aktif), dan/atau Resi pengurusan penerbitan STR
9. Sertifikat Pendidik bagi Pelamar pada formasi jabatan Guru (yang memiliki sertifikat pendidik) yang linier.
10. Bagi Pelamar dengan kriteria Disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

Dokumen tersebut diatas diunggah pada saat Pendaftaran pada https://sscasn.bkn.go.id:, dan apabila menu ungguh tidak tersedia, dapat diunggah pada **Dokumen Pendukung Lainnya**' dengan menggabungkan menjadi 1 (satu) file.

D. ALUR PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun pada ***https://sscasn.bkn.go.id*** dengan cara:
   a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
   b. Isi biodata dan kolom lainnya;
   c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format JPG;
   d. Cetak Kartu Informasi Akun.

2. Pelamar *log in* ke ***https://sscasn.bkn.go.id*** dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
7. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
8. Simpan data yang telah dicek pada "form Resume" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

IV.PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs online https://sscasn.bkn.go.id dan https://www.madina.go.id
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system Computer Asissted Test (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui online https://sscasn.bkn.go.id;
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
   a. Ijazah Asli;
   b. e-KTP dan Kkasli;
   c. Kartu tanda peserta ujian Asli.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (4), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat disitus online Kabupaten Mandailing Natal https://www.madina.go.id ;
7. Apabila peserta ujian tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (Computer Asissted Test).
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. *Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak bertanggung jawab atas pungutan* atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Penerimaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah kelulusan penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
4. *Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada pihak tertentu* (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak – pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga, dan pihak lain, dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019.

6. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di ***https://sscasn.bkn.go.id*** dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan melakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir,diketahui terdapat keterangan/ data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan maka panitia seleksi menggugurkan kelulusan pelamar/ pendaftar/ peserta/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan.
8. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi Daerah CPNS Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
9. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs online Portal SSCASN Tahun 2019.
10. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, menandatangani pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas/pindah wilayah kerja/pindah instansi apabila belum mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di atas meterai 6000;
11. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi CPNS BKN dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
12. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada PANSELNAS untuk diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada Penerimaan CPNS periode berikutnya.
13. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
14. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS;
15. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi CPNS Tahun 2019 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
16. Keputusan Tim Panitia Seleksi Daerah CPNS Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersifat **PINAL** tidak dapat diganggu gugat.
17. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 https://sscasn.bkn.go.id dan https://www.madina.go.id;
18. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 dapat menghubungi:
    a. Nomor HP 081262857671 hanya menerima ***WhatsApp*** pada hari Senin *s.d.* Jumat pukul 08.00 s.d. 16.30 Wib
    b. Telegram : **CPNS MADINA 2019** pada hari Senin *s.d.* Jumat pukul 08.00 s.d. 16.30 Wib
    c. Email : ***penerimaan.bkd.madina@gmail.com*** pada hari Senin *s.d.* Jumat pukul 08.00 s.d. 16.30 Wib;

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Penerimaan	November 2019
2	Pendaftaran Online (https://sscasn.bkn.go.id)	Direncanakan mulai 11 November 2019
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	Direncanakan Bulan Desember 2019
4	Masa Sanggah	Direncanakan Bulan Januari 2020
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Direncanakan Bulan Februari 2020
6	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Direncanakan Bulan Maret 2020
7	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Direncanakan Bulan Maret 2020
8	Integrasi Nilai SKD dan SKB	Direncanakan Bulan April 2020
9	Pengumuman Kelulusan Akhir	Direncanakan Bulan April 2020

Catatan: Jadwal diatas adalah bersifat Tentatif, apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas, jadwal, persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi akan diumumkan melalui website https://sscasn.go.id dan https://www.madina.go.id

Panyabungan, 08 November 2019
BUPATI MANDAILING NATAL

Dra. H. DAHLAN HASAN NASUTION

Contoh surat lamaran

Ibukota Kecamatan, 2019

Kepada
Yth. **BUPATI MANDAILING NATAL**

Perihal : Permohonan untuk mengikuti
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di –
Panyabungan

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Pengumuman Bapak Bupati Mandailing Natal Nomor : ..... tanggal ..... 2019 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : *(sesuai Ijazah dan menggunakan huruf kapital)*
N I K : *(Nomor Induk Kependudukan, sesuai KTP)*
Tempat/Tanggal lahir : *(sesuai Ijazah dan menggunakan huruf kapital)*
Jenis kelamin : Pria / Wanita
Agama : .....
Pendidikan / Jurusan : *(sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan)*
Alamat lengkap (sesuai KTP) : Jl. .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kab./Kota : .....
Provinsi : .....
Kode Pos : .....
No. Telp/HP. : .....
E-mail : .....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat kiranya mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018 sebagai ..... ***(nama jabatan)***, dengan kualifikasi pendidikan ..... ***(kualifikasi pendidikan yang dimiliki)***.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini turut saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Scan Kartu Tanda Penduduk Asli /Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Scan Pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6;
3. Scan Ijazah asli;
4. Scan Transkrip Nilai asli;
5. Scan Bukti Perguruan Tinggi dan Program Studi terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
6. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (aktif), dan/atau Resi pengurusan penerbitan STR
7. Scan Sertifikat Pendidik bagi Pelamar pada formasi jabatan Guru (yang memiliki sertifikat (pendidik) yang linier.
8. Bagi Pelamar dengan kriteria Disabilitas, ditambah dengan Scan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan semoga Bapak dapat mempertimbangkannya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai Rp. 6000

.....

LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 810/844/BKD/2019
TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2019

FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI		
				DISABILITAS	UMUM	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH SELURUNYA				*5*	*213*	*218*
I. TENAGA PENDIDIKAN				5	59	64
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SD NEGERI 397 PADANG LARU , GURU AGAMA ISLAM	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA BATANG GADIS , KEPALA SD NEGERI 392 TABUYUNG , GURU AGAMA ISLAM	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATANG NATAL , KEPALA SD NEGERI 283 AEK BARU JAE , GURU AGAMA ISLAM	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN SIABU , KEPALA SD NEGERI 001 SIHEPENG , GURU AGAMA ISLAM	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SD NEGERI 126 GUNUNG BARINGIN , GURU AGAMA ISLAM	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN BARAT , KEPALA SD NEGERI 136 HUTATONGA , GURU AGAMA ISLAM	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 6 NATAL , GURU BAHASA INDONESIA	-	1	1
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA BAHASA INGGRIS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 1 NATAL , GURU BAHASA INGGRIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN BARAT , KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN BARAT , GURU BAHASA INGGRIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 6 NATAL , GURU BAHASA INGGRIS	-	1	1
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN SELATAN , KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN , GURU BIMBINGAN KONSELING	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 6 NATAL , GURU BIMBINGAN KONSELING	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 2 NATAL , GURU BIMBINGAN KONSELING	-	1	1
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/ S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA BATANG GADIS , KEPALA SMP NEGERI 3 SATU ATAP MUARA BARTANG GADIS , GURU IPA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN HUTA BARGOT , KEPALA SMP NEGERI 1 HUTABARGOT , GURU IPA	1	1	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATAHAN , KEPALA SMP NEGERI 2 BATAHAN , GURU IPA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATANG NATAL , KEPALA SMP NEGERI 4 BATANG NATAL SATU ATAP , GURU IPA	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 1 NATAL , GURU IPA	-	1	1
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 1 NATAL , GURU IPS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN TIMUR , GURU IPS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN HUTA BARGOT , KEPALA SMP NEGERI 1 HUTABARGOT , GURU IPS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN BARAT , KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN BARAT , GURU IPS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 8 NATAL , GURU IPS	1	1	2
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN HUTA BARGOT , KEPALA SD NEGERI 123 HUTA BARGOT DOLOK , GURU KELAS	1	2	3
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SD NEGERI 132 HUTATUA , GURU KELAS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN LINGGA BAYU , KEPALA SD NEGERI 305 KAMPUNG BARU , GURU KELAS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA BATANG GADIS , KEPALA SD NEGERI 392 TABUYUNG , GURU KELAS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA BATANG GADIS , KEPALA SD NEGERI 390 SALE BARU , GURU KELAS	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATANG NATAL , KEPALA SD NEGERI 283 AEK BARU JAE , GURU KELAS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SD NEGERI 130 RANTONATAS , GURU KELAS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SD NEGERI 131 TANJUNG , GURU KELAS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN BARAT , KEPALA SD NEGERI 141 RUNDING , GURU KELAS	1	1	2
8	AHLI PERTAMA - GURU KEWARGANEGARAAN	S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 1 NATAL , GURU KEWARGANEGARAAN	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN SELATAN, KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN , GURU KEWARGANEGARAAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA BATANG GADIS , KEPALA SMP NEGERI 3 SATU ATAP MUARA BATANG GADIS , GURU KEWARGANEGARAAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN HUTA BARGOT , KEPALA SMP NEGERI 1 HUTABARGOT , GURU KEWARGANEGARAAN	1	1	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 6 NATAL , GURU KEWARGANEGARAAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATAHAN , KEPALA SMP NEGERI 2 BATAHAN , GURU KEWARGANEGARAAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATANG NATAL , KEPALA SMP NEGERI 4 BATANG NATAL SATU ATAP , GURU KEWARGANEGARAAN	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA SIPONGI , KEPALA SMP NEGERI 1 MUARASIPONGI , GURU MATEMATIKA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA BATANG GADIS , KEPALA SMP NEGERI 3 SATU ATAP MUARA BATANG GADIS , GURU MATEMATIKA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN BARAT , KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN BARAT , GURU MATEMATIKA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATAHAN , KEPALA SMP NEGERI 2 BATAHAN , GURU MATEMATIKA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATANG NATAL , KEPALA SMP NEGERI 4 BATANG NATAL SATU ATAP , GURU MATEMATIKA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 2 NATAL , GURU MATEMATIKA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 8 NATAL , GURU MATEMATIKA	-	1	1
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN HUTABARGOT , KEPALA SD NEGERI 120 HUTABARGOT , GURU PENJASORKES	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN LINGGA BAYU , KEPALA SD NEGERI 305 KAMPUNG BARU , GURU PENJASORKES	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN MUARA BATANG GADIS , KEPALA SD NEGERI 392 TABUYUNG , GURU PENJASORKES	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN BATANG NATAL , KEPALA SD NEGERI 283 AEK BARU JAE , GURU PENJASORKES	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SD NEGERI 358 NATAL , GURU PENJASORKES	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SD NEGERI 126 GUNUNG BARINGIN , GURU PENJASORKES	-	1	1
11	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 PENDIDIKAN SENI TARI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN TIMUR , KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN TIMUR , GURU SENI BUDAYA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN NATAL , KEPALA SMP NEGERI 2 NATAL , GURU SENI BUDAYA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN HUTA BARGOT , KEPALA SMP NEGERI 1 HUTABARGOT , GURU SENI BUDAYA	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN PANYABUNGAN BARAT , KEPALA SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN BARAT , GURU SENI BUDAYA	-	1	1
II. TENAGA KESEHATAN				**0**	**114**	**114**
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , APOTEKER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MALINTANG , KEPALA PUSKESMAS MALINTANG , APOTEKER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , APOTEKER	-	1	1
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SINUNUKAN , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS NAGA JUANG , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER	-	2	2
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	S-1 KEDOKTERAN GIGI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MALINTANG , KEPALA PUSKESMAS MALINTANG , DOKTER GIGI	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER GIGI	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER GIGI	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER GIGI	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , DOKTER GIGI	-	1	1
4	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MALINTANG , KEPALA PUSKESMAS MALINTANG , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARASOMA , KEPALA PUSKESMAS MUARASOMA , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE , KEPALA PUSKESMAS , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	-	1	1
5	AHLI PERTAMA - PERAWAT	S-1 KEPERAWATAN+NERS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PAKANTAN , KEPALA PUSKESMAS , PERAWAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SINUNUKAN , KEPALA PUSKESMAS , PERAWAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , PERAWAT	-	3	3

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARASOMA , KEPALA PUSKESMAS MUARASOMA , PERAWAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MALINTANG , KEPALA PUSKESMAS MALINTANG , PERAWAT	-	1	1
6	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , ASISTEN APOTEKER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PAKANTAN , KEPALA PUSKESMAS , ASISTEN APOTEKER	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS TAMBANGAN , KEPALA PUSKESMAS , ASISTEN APOTEKER	-	1	1
7	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS TAMBANGAN , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , KEPALA BIDANG TATA USAHA , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS LONGAT , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MALINTANG , KEPALA PUSKESMAS MALINTANG , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PAKANTAN , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARASOMA , KEPALA PUSKESMAS MUARASOMA , PUSKESMAS PEMBANTU RAO-RAO , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU HUTA PULI , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU HUTA SIANTAR , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARASOMA , KEPALA PUSKESMAS MUARASOMA , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIABU , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MANISAK , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIABU , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU HUTA GODANG MUDA , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIABU , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU TANGGA BOSI , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	2	2

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SINUNUKAN , KEPALA PUSKESMAS , BIDAN	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU MANAMBIN , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU BOTUNG , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU SIMANGAMBAT , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU RANJO BATU , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU SIBINAIL , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU SIRANGKAP , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , KEPALA BIDANG TATA USAHA , PUSKESMAS PEMBANTU BATAHAN I , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS TAMBANGAN , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU HUTA TONGA ANGIN BARAT , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , KEPALA BIDANG TATA USAHA , PUSKESMAS PEMBANTU BANJAR AUR , BIDAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , PONDOK BERSALIN DESA MUARA KUMPULAN , BIDAN	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
8	PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , NUTRISIONIS	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE , KEPALA PUSKESMAS , NUTRISIONIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , NUTRISIONIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARASOMA , KEPALA PUSKESMAS MUARASOMA , NUTRISIONIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , NUTRISIONIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS ULU PUNGKUT , NUTRISIONIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , NUTRISIONIS	-	1	1
9	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE , KEPALA PUSKESMAS , PERAWAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN , KEPALA PUSKESMAS , PERAWAT	-	3	3
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIABU , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU HUTA GODANG MUDA , PERAWAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIABU , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU LUMBAN DOLOK , PERAWAT	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU SIBINAIL , PERAWAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE , KEPALA PUSKESMAS , PUSKESMAS PEMBANTU HUTA SIANTAR , PERAWAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , KEPALA BIDANG TATA USAHA , PUSKESMAS PEMBANTU BATU SONDAT , PERAWAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , PERAWAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MALINTANG , KEPALA PUSKESMAS MALINTANG , PERAWAT	-	5	5
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS MOMPANG , PERAWAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SIHEPENG , KEPALA PUSKESMAS SIHEPENG , PERAWAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS TAMBANGAN , KEPALA PUSKESMAS , PERAWAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARA SIPONGI , KEPALA PUSKESMAS , PERAWAT	-	2	2
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , KEPALA BIDANG TATA USAHA , PUSKESMAS PEMBANTU BANJAR AUR , PERAWAT	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARASOMA , KEPALA PUSKESMAS MUARASOMA , PERAWAT	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
10	PELAKSANA/TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , PEREKAM MEDIS	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS TAMBANGAN , KEPALA PUSKESMAS , PEREKAM MEDIS	-	1	1
11	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , SANITARIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MUARASOMA , KEPALA PUSKESMAS MUARASOMA , SANITARIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS KOTANOPAN , KEPALA PUSKESMAS , SANITARIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS MOMPANG , KEPALA PUSKESMAS , SANITARIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , PUSKESMAS SINUNUKAN , KEPALA PUSKESMAS , SANITARIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BATAHAN , SANITARIAN	-	1	1
III. TENAGA TEKNIS				0	40	40
1	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , ARSIPARIS	-	2	2
2	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAGEMEN / S-1 PERTANIAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 HUKUM PIDANA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , INSPEKTORAT, INSPEKTUR,AUDITOR	-	2	2

1	2	3	4	5	6	7
3	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN II (EKONOMI DAN KESRA) , KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	-	4	4
4	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANIAN , KEPALA UPT BP3K SIHEPENG , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA , PENYULUH PERTANIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANIAN , KEPALA UPT BP3K MOMPANG , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA , PENYULUH PERTANIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANIAN , KEPALA UPT BP3K GUNUNG BARINGIN , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA , PENYULUH PERTANIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANIAN , KEPALA UPT BP3K NAGA JUANG , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA , PENYULUH PERTANIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANIAN , KEPALA UPT BP3K SIRAMBAS , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA , PENYULUH PERTANIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANIAN , KEPALA UPT BP3K ULU PUNGKUT , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA , PENYULUH PERTANIAN	-	1	1
			SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANIAN , KEPALA UPT BP3K MUARA BATANG GADIS , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA , PENYULUH PERTANIAN	-	1	1
5	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , PUSTAKAWAN	-	2	2
6	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	S-1 MANAGEMEN / S-1 HUKUM PIDANA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN , KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
7	ANALIS HUKUM PERTANAHAN	S-1 ILMU TANAH / S-1 HUKUM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PERTANAHAN , BIDANG PERIZINAN,GANTI RUGI DAN SENGKETA TANAH , KEPALA SEKSI GANTI RUGI	-	1	1
8	ANALIS INFRASTRUKTUR	S-1 TEKNIK SIPIL	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN II (EKONOMI DAN KESRA) , KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR , KEPALA SUB BAGIAN PUPR	-	1	1
9	ANALIS JABATAN	S-1 MANAGEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN III ADMINISTRASI , KEPALA BAGIAN ORGANISASI , KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	-	1	1
10	ANALIS KELEMBAGAAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAGEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN III ADMINISTRASI , KEPALA BAGIAN ORGANISASI , KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	-	1	1
11	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 PENJASORKES / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA / S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , KEPALA SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI	-	1	1
12	ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP , KEPALA SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN	-	1	1
13	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	S-1 PSIKOLOGI /S-1 MANAGEMEN/ S-1 HUKUM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN III ADMINISTRASI , KEPALA BAGIAN ORGANISASI , KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA	-	1	1
14	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ,KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	1	1
15	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN / S-1 EKONOMI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , KEPALA SUB BIDANG EKONOMI	-	1	1
16	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	S-1 MANAGEMEN / S-1 EKONOMI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN II (EKONOMI DAN KESRA) , KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM , KEPALA SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL SERTA BADAN USAHA MILIK DAERAH	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
17	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK DAN PRASARANA	-	1	1
18	ANALIS PERTAMBANGAN	S-1 GEOLOGI / S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 PERTAMBANGAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS TENAGA KERJA , KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL , KEPALA SEKSI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	1	1
19	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KEPALA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI , KEPALA SUB BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	1	1
20	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAGEMEN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS TENAGA KERJA , KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA , KEPALA SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	-	1	1
21	OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	D-III TEKNIK INFORMATIKA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT , KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	-	1	1
22	PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH , KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO , KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	-	1	1
23	PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI , KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI	-	1	1
24	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN III ADMINISTRASI , KEPALA BAGIAN UMUM , KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	-	1	1
25	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN	D-III TEKNIK SIPIL	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KEPALA BIDANG BINA MARGA , KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN	-	1	1
26	PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN	D-III TEKNIK SIPIL / D-III ARSITEK	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KEPALA BIDANG TATA RUANG , KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7
27	PENYULUH WISATA	S-1 PARIWISATA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , KEPALA DINAS PARIWISATA , KEPALA BIDANG USAHA JASA DAN SARANA WISATA , KEPALA SEKSI JASA DAN SARANA WISATA	-	1	1
28	TEKNISI ELEKTRONIK	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK INFORMASI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN , ASISTEN III ADMINISTRASI , KEPALA BAGIAN UMUM , KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	-	1	1

BUPATI MANDAILING NATAL,

Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION